

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**TESIS**

**Oleh**

**HENNY WAHYUNI NASUTION  
NPM. 221801027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**HENNY WAHYUNI NASUTION  
NPM. 221801027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii

Document Accepted 3/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** :  
**Nama** : **Henny Wahyuni Nasution**  
**NPM** : **221801027**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**

**Pembimbing II**



**Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Ketua Program Studi Magister**

**Administrasi Publik**



**Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

**Telah diuji pada 20 April 2024**

---

---

**Nama : Henny Wahyuni Nasution**

**NPM : 221801027**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**

**Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

## HALAMAN PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Proposal Tesis ini dengan judul “**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**” adalah benar tulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, April 2024

Henny Wahyuni Nasution  
221801027

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henny Wahyuni Nasution  
NPM : 221801027  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan



**Henny Wahyuni Nasution**

## ABSTRAK

Henny Wahyuni Nasution, SE, Tahun 2023, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Penelitian ini berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang diperoleh dari kuesioner dari beberapa observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 10 orang, dari objek penelitian mendalam dilakukan terhadap Kepala BAPPEDA sebanyak 1 orang, kepala BPKPAD sebanyak 1 orang, Kepala Bidang Anggaran sebanyak 1 orang, PPK BPKPAD sebanyak 1 orang, Kabid Akuntansi 1 orang, Sub Bagian Keuangan 1 orang, Pegawai Keuangan 2 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang dan staf Bidang Perbendaharaan 1 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, menggunakan sistem komputerisasi SITARIDA dan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap Implementasi telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisas Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal.

Kata kunci: Implementasi; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

## ABSTRACT

*Henny Wahyuni Nasution, SE, Year 2023, Implementation of Local Financial Management Information System (SIPKD) in Improving Financial Accountability of the South Tapanuli District, Thesis of the Master's Program in Public Administration, Graduate Program, University of Medan Area, Medan.*

*This research is titled Implementation of the Local Financial Management Information System (SIPKD) in Improving Financial Accountability in South Tapanuli Regency. The research was obtained through questionnaires and several observations and interviews with relevant parties. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, selecting informants through snowball sampling and purposive sampling. The data source used is primary information obtained through direct or indirect observation at the research location and interviews with the, Head of BAPPEDA, Head of BPKPAD, Head of the Budget Section, PPK BPKPAD, Head of Finance, Finance Subdivision, Finance Officer, , Expenditure Treasurer 2 persons, and expenditure treasure, and treasury staff. The results of this research indicate that the implementation of the information system at the Regional Financial Management Agency, Revenue, and Regional Asset utilizes the computerized SITARIDA system and is in accordance with the established guidelines. All implementation stages have been executed well. Similarlssy, the completeness of financial report items complies with the provisions of SKPD Financial Reports, consisting of Budget Realization Reports, Balance Sheets, and Notes to the Financial Statements. Recording and classification of transactions originate from accounting evidence, which is subsequently recorded in the journal.*

*Keywords: Implementation; Local Financial Management Information System; Improvement of Local Financial Accountability.*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Adapun judul tesis ini **“Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Kabupaten Tapanuli Selatan “**.

Dalam pembuatan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari gaya bahasa, penulisan maupun kedalaman materinya. Hal ini terjadi disebabkan pengetahuan dan kemampuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literatur yang berhubungan dengan tesis ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Demikian penulis sampaikan terima kasih.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) .....	7
2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).....	7
2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) .....	8
2.1.3 Kesuksesan Sistem Informasi .....	10
2.1.4 Karakter Sistem .....	14
2.1.5 Efektivitas Sistem Informasi .....	15
2.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	16
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas.....	16
2.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas .....	18
2.2.3 Akuntabilitas Keuangan.....	18
2.2.4 Keuangan Daerah.....	20
2.3 Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah .....	21
2.4 Penelitian Terdahulu .....	22
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	27
3.2 Waktu Penelitian.....	27
3.3 Jenis Penelitian .....	28
3.4 Sumber Data .....	29
3.5 Informan Penelitian .....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31

3.7 Definisi Konsep .....	32
3.8 Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Profil Kabupaten Tapanuli Selatan .....	35
4.1.2 Kondisi Penduduk.....	38
4.1.3 Profil Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	44
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.....	61
4.2.1.1 Maksud Laporan Keuangan Dan Tujuan Penyusunan .....	64
4.2.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD...68	
4.2.1.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemkab. Tapsel .....	71
4.2.2 Faktor Pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kab. Tapsel .....	82
4.2.3 Faktor Penghambat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kab. Tapsel .....	86
4.3 Pembahasan .....	91
4.3.1 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPKPAD Kab. Tapsel .....	91
4.3.2 Faktor Pendukung Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas di kab. Tapsel .....	94
4.3.3 Faktor Penghambat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam	
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARANAN.....</b>	<b>99</b>
5.1 Simpulan.....	99
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Rencana Penelitian .....	26
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 .....	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.....	40
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.....	41
Tabel 4.4 Ikhtisar Kinerja Keuangan TA 2022 .....	71
Tabel 4.5 Ikhtisar Kinerja Keuangan TA 2021 dan 2022 .....	72
Tabel 4.6 Realisasi Pendapatan TA 2022 .....	74
Tabel 4.7 Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2022 .....	76
Tabel 4.8 Komposisi Pendapatan TA 2021 dan 2022.....	77
Tabel 4.9 Realisasi Belanja TA 2022.....	78
Tabel 4.10 Realisasi Belanja TA 2021 dan 2022.....	79
Tabel 4.11 Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022 .....	80
Tabel 4.12 Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021 dan 2022 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	25
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.....	25
Gambar4.2 Struktur Organisasi Kabupaten Tanapnuli Selatan .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar belakang**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah, merupakan suatu peluang emas bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang merata. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh dana yang matang dan memadai.

Salah satu faktor pendukung dalam menciptakan pembangunan daerah yang handal adalah setiap daerah tentunya membutuhkan keuangan yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Dengan adanya keuangan ini tentu saja diharapkan setiap daerah dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu pemerataan pembangunan disegala bidang yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu penyusunan keuangan atau anggaran yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan anggaran berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan yang

menggunakan anggaran negara. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif dan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Daerah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka meminimalisir tingkat penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan anggaran dan membrantas praktek-praktek Korupsi.

Faktor yang diharapkan dapat meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang akuntabel kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah berbasis pada jaringan komputer dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*), yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.

Pengembangan SIPKD bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Lebih lanjut SIPKD merupakan sistem informasi yang didalamnya memuat proses penyusunan APBD sampai ketahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan beserta pencatatan kode rekeningnya. Proses penyusunan tersebut dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di daerah beserta program dan kegiatannya, program dan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap SKPD. Data pra rencana kerja ini nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga rancangan tersebut disusun menjadi data APBD.

Pada prinsipnya SIPKD lahir karena muncul masalah dalam pengelolaan keuangan, menurut Jones et al. (1985) dalam Steccolini (2002) dalam Mulyana (2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna dan juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Permasalahannya sekarang adalah berdasarkan observasi penulis di sejumlah



SKPD di Kabupaten Tapanuli Selatan implementasi SIPKD dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan akibat terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Salah satunya yaitu masih terkendalanya sumber daya terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang berupa dana dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya sering terjadi kesalahan dalam meng-input atau mengentri data untuk tiap SKPD, masih ditemukan juga kesalahan pengisian kode rekening yang tidak lengkap atau tidak sempurna, ini tentu saja akan menghambat dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat tentang anggaran yang dikelola oleh tiap SKPD di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan sejumlah bendahara SKPD di Kabupaten Tapanuli Selatan SKPD jarang mengikutsertakan Bendahara pada pelatihan-pelatihan atau diklat yang berkaitan dengan SIPKD, pada saat penyusunan RKA maupun Renja atasan jarang melibatkan bidang - bidang yang pada akhirnya berdampak pada penyusunan RKA maupun Renja yang kurang efektif atau kurang sesuai dengan prioritas kebutuhan Bidang.

Kurang efektifnya implementasi aplikasi SIPKD tersebut berdampak pada kurang baiknya Akuntabilitas Keuangan, berdasarkan observasi penulis dan berdasarkan data LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat, secara keseluruhan SKPD yang dijadikan sampel pada penelitian didapat temuan diantaranya adalah RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang diajukan SKPD kurang terealisasi dan tepat sasaran baik dari segi kualitas maupun kuantitas, SKPD diindikasikan kurang disiplin dan tertib dalam membuat SPJ sebagai bukti rill

dalam penggunaan anggaran. Selain itu berdasarkan data LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK melaporkan adanya beberapa kelemahan seperti, belum terintegrasinya sistem aplikasi dan TI (Teknologi Informasi keuangan negara dalam penyusunan LKPP, penerimaan SKPD yang memiliki PAD kurang transparan dan masih ditemukan pendapatan yang tidak disetor langsung ke kas negara, masih adanya rekening yang belum ditertibkan serta perbedaan saldo Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan saldo fisik uang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rendahnya Akuntabilitas Keuangan pada Kabupaten Tapanuli Selatan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

## **I.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang diambil sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan?
- 2) Apa faktor pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan?
- 3) Apa faktor penghambat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah/Pusat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa menjadi pandangan dan pengetahuan serta bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan terutama di dalam keputusan menerapkan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar di dalam implementasinya berjalan dengan baik, efektif dan efisien, serta bisa menghasilkan suatu sistem informasi yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi.

#### **2. Bagi Akademik**

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

##### 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sistem di definisikan oleh Wilkinson (1992) dalam Mulyono (2009) Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Schell, (2001) Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Supriyanto, (2005) adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang, sedangkan informasi menurut Wilkinson (1992) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan.

Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah

Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Saragih, 2008). Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).**

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan dalam rangka membantu memudahkan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Proses keuangan pada Pemerintah Daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan, Peranan SIPKD adalah melakukan pemrosesan dan pengelolaan hubungan

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan pada masing-masing instansi terkait, diharapkan dengan pengimplementasian sistem informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan pada setiap daerah dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Dalam perkembangannya SIPKD sampai saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah di 171 kabupaten dan kota. Implementasi Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi berbasis web dimana setiap bagian (penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan) saling terintegrasi satu sama lain. Sistem ini terdiri dari 3 modul utama yang cukup besar yaitu *modul Core*, *Non Core* dan *Kolaborasi*. *Modul Core* merupakan modul inti dalam SIPKD yang berisi proses perumusan anggaran, pelaksanaan kas, dan pembukuan serta pertanggungjawaban APBD. *Modul Non Core* yang merupakan modul tambahan dalam SIPKD, berisi catatan pendapatan dan piutang, *payroll* dan manajemen aset daerah. Sedangkan *modul Kolaborasi* lebih ditujukan kepada para pejabat daerah karena berisi Sistem Informasi Eksekutif. Sistem yang dibangun ini merupakan suatu sistem dokumentasi terkomputerisasi yang digunakan untuk menyimpan dengan baik semua berkas yang dihasilkan dalam proses perancangan dan pelaksanaan APBD. Penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi pada organisasi sektor publik berbeda dengan penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi pada organisasi sektor bisnis, dimana investasi dan penerapan aplikasi teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi bisnis dibutuhkan dalam penunjang kinerja organisasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan

dinamika bersaing dalam memperoleh laba.

Pemerintah Pusat menyelenggarakan penerapan aplikasi SIPKD secara nasional dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit Anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi di sektor publik dapat meningkatkan kinerja secara maksimal. Hal ini berarti dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelesaian tugas-tugas di perusahaan atau organisasi. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat. Oleh karena itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dan pengelolaan keuangan secara khusus.

### **2.1.3 Kesuksesan Sistem Informasi**

Hasil-hasil yang ditampilkan oleh DeLone dan McLean menunjukkan bahwa pengukuran keberhasilan (2003) sistem informasi bukan pengukuran tunggal tetapi merupakan suatu konstruk multidimensi. Berdasarkan kontribusi-kontribusi

penelitian-penelitian sebelumnya dan akibat diiringi perubahan-perubahan dari peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang, DeLone dan McLean (2003) memperbaharui modelnya dan menyebutnya sebagai model kesuksesan sistem informasi D & M diperbaharui (*update D&M is success model*) Hal-hal yang diperbaharui ini adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan dimensi kualitas pelayanan (*service quality*) sebagai tambahan dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas informasi (*information quality*).
2. Menggabungkan dampak individual (*individual impact*) dan dampak organisasional (*organizational impact*) menjadi satu variabel yaitu menjadi manfaat-manfaat bersih (*net benefits*). Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model tetap sederhana (*parsimony*).
3. Menambahkan dimensi minat pemakai (*intention to use*) sebagai alternatif dari dimensi pemakaian (*use*). Pengukuran dari pemakaian (*use*) mempunyai banyak dimensi, seperti misalnya pemakaian sukarela atau wajib, mendapat informasi (*informed*) atau tidak mendapat informasi (*informed*) atau tidak mendapatkan informasi (*uninformed*), dan lainnya. DeLone dan McLean (2003) mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu minat memakai (*intention to use*). Minat memakai adalah suatu sikap (*attitude*). Sedang pemakaian (*use*) adalah suatu perilaku (*behaviour*).
4. Pemakaian (*use*) dan kepuasan pemakaian (*user satisfaction*) saling mempengaruhi dengan sangat erat. Pemakaian harus didahului kepuasan pemakaian (*user satisfaction*) sebagai suatu proses, tetapi pengalaman yang



positif karena menggunakan akan mengakibatkan kepuasan pemakai yang lebih tinggi sebagai suatu kausal. Secara sama, peningkatan kepuasan pemakai akan mengakibatkan peningkatan minat menggunakan (*intention to use*) dan kemudian menggunakan.

5. Dampak dari sistem informasi sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampak sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumen, kontraktor, sosial bahkan negara. DeLone dan McLean (2003) mengusulkan untuk menamakannya semua manfaat menjadi suatu manfaat tunggal yang disebut dengan nama manfaat-manfaat bersih (*net benefits*) jika manfaat-manfaat bersih (*netbenefits*) positif akan menguatkan minat pemakai. Umpan balik ini masi valid bahkan untuk manfaat-manfaat bersih yang negatif.

Kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dua dimensi pertama dan utama pada *D&M IS Success Model*, dimana kualitas sistem menunjukkan kualitas produk dari aplikasi sistem informasinya dan kualitas informasi menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasinya. Kedua kualitas tersebut, menentukan sikap dari pemakainya sebagai penerima informasinya. Penggunaan sistem dan informasinya akan mempunyai pengaruh pada pemakainya dan pada sistemnya. Pengaruh pada pemakainya akan menentukan kepuasan dari pemakainya dan dampak pada individualnya. Pengaruh dari sistemnya akan dipengaruhi dampak organisasinya.

Begitu juga dengan Livari (2005) pada penelitiannya di sektor publik memberikan bukti empiris bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaanya yang juga berpengaruh signifikan terhadap dampak organisasi (*organizational impact*). Hal ini dikarenakan obyek penelitian Livari (2005) menggunakan obyek penggunaan sistem yang mandatory.

Leavitt (1965) dalam Livari (2005) mencermati bahwa penerapan sistem informasi yang baru akan berdampak pada reaksi yang ditunjukkan oleh perilaku individu dalam organisasi. Reaksi itu dapat berupa munculnya motivasi baru untuk bersaing dan meningkatkan kinerja. Secara positif keberadaan sistem informasi baru akan menjadi rangsangan (*stimulus*) dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja sama lebih baik, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja organisasi dan sebaliknya.

Peneliti di bidang ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dapat menjadi stimulus dalam mengubah hirarki pengambilan keputusan dan menurunkan biaya untuk distribusi informasi. Keberadaan sistem informasi dapat memangkas fungsi dari manajer tingkat menengah. Dengan terpangkasnya fungsi manajer tingkat menengah ini maka keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan lebih murah, begitu juga dengan distribusi informasi. Hal ini merupakan alasan yang menguatkan bahwa keberadaan sistem informasi dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi, dalam kasus ini untuk pemerintah daerah, dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 2.1.4 Karakteristik Sistem

Menurut Agus Mulyanto (2009 : 2) mengatakan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik agar sistem dapat dibedakan dengan sistem yang lain. Berikut ini macam-macam karakteristik suatu sistem, diantaranya :

1. Komponen Sistem (*component*), dimana suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka disebut subsistem, sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya.
2. Batas Sistem (*boundary*) merupakan pembatas atau pemisah suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan Luar Sistem (*environment*) merupakan sesuatu di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan ataupun yang merugikan.
4. Penghubung Sistem (*interface*) merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya penghubung, sistem akan berisi kumpulan subsistem yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Maka dari itu penghubung dapat juga didefinisikan sebagai tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi.
5. Masukan Sistem (*input*) merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, dimana masukan tersebut dapat berupa bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi (*maintenance input*), dan masukan yang diproses untuk mendapat keluaran (*signal input*).

6. Keluaran Sistem (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan, yang berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan.
7. Pengolah sistem (*process*) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.
8. Sasaran Sistem merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem, agar sistem menjadi terarah dan terkendali.

### 2.1.5 Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas Sistem Informasi dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Bodnar (2000) menjabarkan beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

1. Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
2. Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
3. Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.

4. Indikator variasi laporan atau *output* berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
5. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan

## **2.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah**

### **2.2.1. Pengertian Akuntabilitas**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem ini bertujuan agar penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, beberapa diantaranya dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. Sjahrudin Rasul (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang

lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

2. J.B. Gharthey (2001) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan *stewardship* yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.
3. Ledvina V. Carino (2004) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kemenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain.
4. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
5. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak- pihak

yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Sesuai Pasal 1 UU 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa tanggung jawab keuangan negara merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### **2.2.2. Prinsip - Prinsip Akuntabilitas**

Menurut M. Ryaas Rasyid (2003) prinsip - prinsip akuntabilitas meliputi:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **2.2.3. Akuntabilitas Keuangan**

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem

akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Sjahrudin Rasul (2007) menyatakan pada dasarnya pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan yang harus dipenuhi paling tidak memenuhi:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*), Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*), Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukannya *compulsory competitive tendering contract* (CCTC) dan penghapusan *mark up*. Untuk itu perlu kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*), Akuntabilitas kebijakan



terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

#### **2.2.4. Keuangan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi serta melaksanakan pemerintahan pastilah membutuhkan uang untuk menjalankan pemerintahannya. Dimana berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Widjaja (2000) dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi menyebutkan bahwa yang di maksud dengan keuangan daerah adalah : “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD” Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu; hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

### **2.3 Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Salah satu kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terletak pada ketidakmampuan menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data aset, anggaran, gaji, serta proses penatausahaan, sehingga menimbulkan banyak data yang tidak akurat dalam proses akuntansi yang menghasilkan LKPD. Kelemahan lain pada pengelolaan keuangan daerah adalah

tidak tersedianya unit arsip data pengelolaan keuangan yang baik sehingga banyak data penting yang hilang. Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah tentu sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyajikan LKPD yang transparan dan akuntabel. Ditjen Keuangan Daerah perlu terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara demi perbaikan kualitas laporan keuangan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini, implementasi standar akuntansi pemerintah sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusianya. Pada era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menjadi isu sentral yang menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital pada masyarakat, hampir semua instansi pemerintah telah memiliki halaman web sendiri. Melalui website ini, instansi pemerintah telah dapat menyajikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan perencanaan pembangunan, struktur organisasi tata kerja, pelayanan publik, peraturan *website* yang diteliti yang mempublikasikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Strategi yang ditawarkan dalam hal pembaruan teknologi ini adalah mengoptimalkan penggunaan *website* instansi pemerintah dengan mengupayakan lebih transparan dan dapat digunakan langsung oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan anggaran pemerintah

daerah. SIPKD hadir untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dapat mengakomodir seluruh pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah, yakni SIPKD.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah teknologi informasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet.

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1 Penelitian Terdahulu**

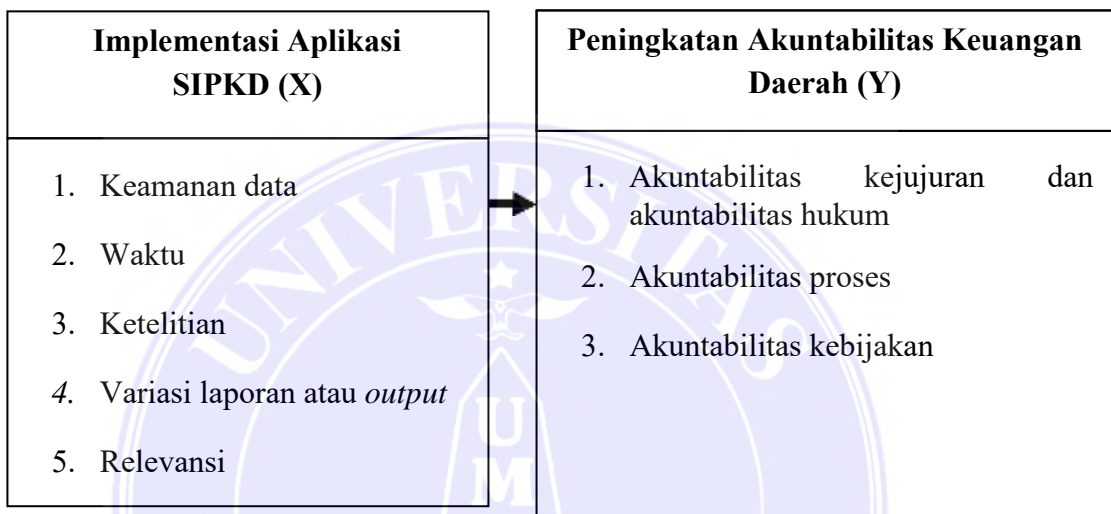
<b>Nama Peneliti (Tahun Penelitian)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Budi Mulyana/ 2006	Pengaruh Penyajian	-Penyajian neraca daerah	Membahas akuntabilitas	- Penelitian tidak

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas keuangan daerah.	keuangan daerah	membahas tentang SIPKD - populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Imam Mulyono / 2009	Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.	Model kesuksesan sistem informasi DeLone and Mc Lean terbukti signifikan secara empiris dalam kasus kesuksesan implementasi SIKD terutama di obyek penelitian.	- Menganalisis Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	- Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna sistem informasi keuangan daerah Pemkot Malang dan Pemkot Batu.

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Imanurica Annisa Putri/ 2011	Analisis Model Kesuksesan Implementasi Aplikasi SIPKD Dalam Rangka Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	- Kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna; - Kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap net benefit.	Menganalisis SIPKD terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah	- Penelitian menggunakan sampel dan responden dari pemda kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan timur.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian pengaruh implementasi aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemda Provinsi Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut yaitu “

Ha: Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah Pada Kabupaten Tapanuli Selatan

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### 3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2007) menentukan cara terbaik yang bisa ditempuh oleh seorang peneliti dengan mempertimbangkan teori dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan (Moleong, 2007a). Berangkat dari pertimbangan tersebut, peneliti kemudian menentukan tempat dalam penelitian ini di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini karena belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama di lokasi tersebut.

##### 3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan September-Desember 2022. Berikut rencana penelitian ini:

**Tabel. 3.1. Rencana Penelitian**

Waktu/ Kegiatan	Bulan															
	Maret 2023				April 2023				Juni 2023				Juli 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset awal	■	■	■													
Pembuatan Proposal				■	■	■	■									
Bimbingan dan Kolokium								■	■							
Pengumpulan data									■	■	■	■				
Pengolahan data dan bimbingan													■	■	■	
Draft Tesis selesai, seminar hasil dan ujian komperehensif													■	■	■	



### 3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, menganalisis dan memberikan uraian serta keterangan singkat terhadap data yang ada sehingga kesimpulan yang diambil dapat mendekati kenyataan yang ada (Burhan, 2010). Sementara itu pendekatan analisis deskriptif menurut Winartha (2006) adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan (Winartha, 2006). Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan analisis secara langsung terhadap Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. Prastowo (2011) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Prastowo, 2011).

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk melihat dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, serta melihat tantangan dan hambatan apa saja yang terjadi di dalam memberikan pelaksanaannya. Menurut Creswell dan Poth (2016), penelitian kualitatif lebih

terfokus pada proses, arti dan pemahaman tentang pengalaman, serta penghayatan subjektif partisan. Selain itu, penelitian kualitatif juga lebih tertarik pada arti (*meaning*), yakni upaya partisan menghayati pengalaman dan mengekspresikan dalam hidupnya. Penelitian kualitatif kurang mementingkan angka (kuantifikasi), tetapi cenderung kepada interpretasi dan sangat menerima subjektivitasnya terhadap situasi (Creswell & Poth, 2016).

### 3.4. Sumber Data

Penggunaan kata-kata dan perbuatan dalam penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data yang paling penting, sedangkan sisanya berasal dari sumber sekunder seperti catatan, buku, majalah, dan bahan arsip dan sumber lain yang kaitan dengan topik penelitian. Berikut sumber data utama penelitian kualitatif, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang dihasilkan peneliti langsung dari sumbernya (tanpa menggunakan perantara), seperti informasi yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Begitu juga informasi yang dikumpulkan berupa pendapat individu subyek, pendapat kelompok, atau hasil pengamatan terhadap suatu situasi dan kejadian, serta kesulitan penelitian pelayanan para pegawai di Kantor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga data atau informasi yang diperoleh dari lembaga atau lembaga yang ada dan/atau terkait dengan layanan publik

berupa catatan atau laporan harian, adalah data atau informasi yang peneliti terima tidak secara langsung dari sumber aslinya (data atau informasi yang didapat melalui pihak ketiga). Ada dua jenis materi: dapat diterbitkan dan tidak dapat diterbitkan.

### 3.5. Informan Penelitian

Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menarik kesimpulan yang luas dari hasil-hasilnya. Ada tiga macam informan penelitian, yaitu: a). Informan kunci yakni mereka yang memiliki pengetahuan tentang dan memiliki akses ke berbagai data fundamental, b). Informan utama ialah mereka yang berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial yang diteliti, c). Informan tambahan yaitu mereka yang dapat menawarkan data meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang dipelajari (Sukandarrumidi, 2002).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 10 orang, dari objek penelitian mendalam dilakukan terhadap Kepala BAPPEDA sebanyak 1 orang, kepala BPKPAD sebanyak 1 orang, Kepala Bidang Anggaran sebanyak 1 orang, PPK BPKPAD sebanyak 1 orang, Kabid Akuntansi 1 orang, Sub Bagian Keuangan 1 orang, Pegawai Keuangan 2 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang dan staf Bidang Perbendaharaan 1 orang, yang di jadikan informan dalam penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data holistik dan integratif, serta memerhatikan relevansi data dengan tujuan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti memakai tiga teknik yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor (1992), yaitu: Wawancara mendalam (*indept interview*), Observasi (*observation*) dan Studi dokumen (*study document*) (Bogdan & Taylor, 1992).

Sedangkan Robert K Yin menyarankan enam teknik, yaitu: (1) dokumen (*documentation*); (2) rekaman arsip (*archival record*); (3) wawancara (*interview*); (4) observasi langsung (*direct observation*); (5) observasi partisipan (*participant observation*); dan (6) perangkat fisik (*physical artifacts*) (Yin, 2002).

Namun di dalam penelitian ini, peneliti lebih condong untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang ditawarkan oleh Bogdan dan Taylor, karena peneliti menganggap lebih sesuai dan cocok dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)

b. Observasi (pengamatan)

observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam

observasi adalah data-data seperti perilaku pegawai saat melayani, proses pelayanan pegawai terhadap masyarakat, pimpinan yang memberikan arahan, pegawai yang sedang rapat.

c. Studi Dokumen

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta video dokumentasi kegiatan. (Nasution, 1988).

### 3.7. Definisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian ini perlu dirumuskan ke dalam batasan-batasan yang dipakai untuk menghindari adanya interperensi yang berbeda terhadap masalah yang akan diteliti yang di maksud dalam penelitan ini adalah:

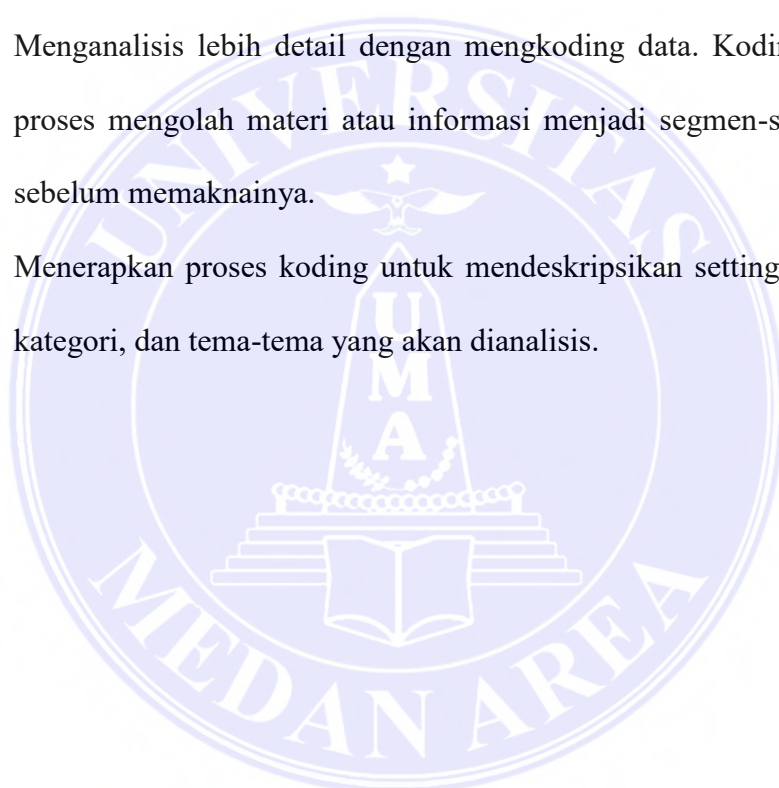
1. Perencanaan dalam hal ini bagaimana pemanfaatan pengelolaan anggaran (mengalokasikan) yang seharusnya sehingga penggunaan anggaran sedapat mungkin transparan dan tepat sasaran dengantujuan yang sudah di rencanakan, adapun indikator dari perencanaan terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Strategi anggaran dalam hal ini strategi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dalam memperbaiki penyusunan anggaran.
  - b. Tujuan perencanaan anggaran dalam hal ini mau melihat apakah sesuai dengan perencanaan dengan strategi anggaran yang digunakan berjalan secara efektif dan efisien dalam memperbaiki penyusunan anggaran.

2. Pengendalian dalam hal ini adalah upaya untuk menjamin agar sasaran yang ingin tercapai dan sebagai tolak ukur untuk menentukan arah penggunaan anggaran. adapun indikator dari pengendalian terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Penyusunan anggaran dalam proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.
  - b. Pengawasan anggaran segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran- pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran dan bisa dilihat oleh masyarakat.
3. Akuntabilitas Publik adalah sebuah proses untuk memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
  - a. Pelaksanaan anggaran dalam hal ini proses bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses penyusunan anggaran.
  - b. Pertanggungjawaban yang dilakukan melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik dalam perbaikan proses penyusunan anggaran di Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan mengelaborasi hasil data yang didapat, baik secara kualitatif dengan deskripsi yang terstruktur dan rinci. Menurut Creswell (1998) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

1. Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscaning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan program aplikasi SITARIDA Versi 2.9. dengan adanya sistem aplikasi SITARIDA Keuangan ini dapat memudahkan pegawai/staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses akuntansi, mulai dari pencatatan yaitu memasukkan/menginput transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya kemudian diolah secara otomatis untuk menuju ke proses selanjutnya hingga membentuk sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Faktor pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas di Kabupaten Tapanuli Selatan telah memberikan hasil positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa aspek yang disoroti meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, pelaksanaan bimtek, peningkatan SDM melalui



perekrutan, dan pendampingan oleh bagian akuntansi menunjukkan usaha serius untuk meningkatkan kualitas dan jumlah personel yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Penerapan SITARIDA Keuangan dalam berbagai bidang seperti anggaran, penatausahaan, dan akuntansi, serta pembuatan laporan yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan dampak positif pada efisiensi dan kualitas laporan keuangan. Integrasi SIAKD dengan SITARIDA Keuangan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, termasuk penganggaran dan penata-usahaan. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis accrual, mulai dari SITARIDA versi 2.7 hingga versi 2.9, menunjukkan komitmen terhadap standar akuntansi yang memadai dan sesuai dengan prinsip *accrual* dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Faktor penghambat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Di Kabupaten Tapanuli karena kekurangan tenaga kerja yang terampil. Hal ini termasuk kekurangan personel yang ahli dalam mengoperasikan SIPKD dan kekurangan sumber daya manusia untuk menangani beban kerja yang terkait. Keterlambatan dalam mensosialisasikan aplikasi dan regulasi SIPKD terbaru disebabkan oleh kompleksitas sistem, melibatkan banyak pihak, serta kendala anggaran, infrastruktur, dan birokrasi. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, terutama di pemerintah daerah di negara berkembang. Ini termasuk perangkat keras usang,

keterbatasan konektivitas internet, dan dukungan teknis yang kurang memadai. Kekurangan pelatihan dan dukungan staf dapat menghambat penggunaan optimal SIPKD.

## 5.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak lain sebagai berikut:

1. Pemerintah
  - a. Perlunya pembinaan terhadap aparat pemerintahan sebagai langkah pemberdayaan kinerja aparat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan informasi yang relevan.
  - b. Pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan, dengan cara lebih pro aktif dan lebih intens memberikan petunjuk dan evaluasi kinerja pemerintahan.
  - c. Pemerintah harus memberikan dorongan secara intensif kepada pemerintahan agar terus menunjukkan sikap proaktif kepada masyarakat agar program pelayanan bisa berjalan dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya di harapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian saran prasarana pendidikan dan efektivitas proses

pembelajaran.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penelitiannya agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bodnar, H, 2000, George dan William S.Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku I, Edisi Ke-6, Penerjemah Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, Jakarta: Salemba Empat.
- HR, Syakuni. Afan gaffer dan M. Ryaas rasyid. 2005. *Otonomi Daerah (Dalam Negara Kesatuan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J.B. Ghartey. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ledvina V. Carino. 2004. *Organization and Management in The Public Sector, Alih Bahasa*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2009. *Pembangunan, Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- McLeod, Raymond; George P Schell. 2008. *Management Information System- Sistem Informasi Manajemen*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusdiklatwas BPKP. 2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Kelima.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka Rasul.
- Sjahruddin, Dr, S.H. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Supriyanto. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.
- Widjaja. 2000. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joseps, W. Wilkinson. 1994. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal:

- Amrul, Sadat dan Syar'ie, Ahyadi. 2005. Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Proses Pengembangan Kualitas Sistem. Solo: *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- DeLone and McLean. 2003. Model of Information Systems Success: A Ten – Year Update. *Journal of Management Information System, Vol19, No. 4*
- Livari, Juhani. 2005. “An Empirical Test of The Delone and McLean Model of Information System Success”, Database fo Advances in Information System, Spring.

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi pemerintah Vol. 2.*

Mulyono, Imam. 2009. Uji Empiris Model Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas keuangan Daerah. Palembang : *Simposium Nasional Akuntansi X*

Putri, Imanurica Annisa. 2011. *Analisis Model Kesuksesan Implementasi Aplikasi SIPKD Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.* Universitas Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **Peraturan:**

Peraturan Pemerintah RI tentang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

